



# Capture Fisheries Development Strategy in Namrole Sub district, South Buru Regency: SWOT Approach

(Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan: Pendekatan SWOT)

Muhammad Djafar Souwakil <sup>1✉</sup>, Ruslan H. S. Tawari <sup>2</sup>, Haruna <sup>2</sup> dan Mintje Wawo <sup>1,3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Jl. Mr. Chr. Soplanit, Kampus Poka Ambon Maluku 97233 Indonesia.

<sup>3</sup> Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Jl. Mr.Cr. Soplanit, Poka- Ambon. Jl. Mr. Chr. Soplanit, Kampus Poka Ambon Maluku 97233 Indonesia.

Email: muhammaddjafar75@gmail.com

Article Info:

Received : 26 Sept. 2025

Accepted : 29 Okt. 20255

Online : 30 Okt. 2025

Article type :

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

Keyword :

Development Strategy, Capture Fisheries, Swot, Namrole, South Buru

Corresponding Author :

Muhammad Djafar Souwakil  
Universitas Pattimura  
Ambon, Indonesia

Email :

muhammaddjafar75@gmail.com

## Abstract

Capture fisheries play a crucial role in supporting the coastal economy of South Buru Regency, particularly in Namrole Subdistrict, which possesses significant potential of pelagic and demersal fish resources that remain suitable for exploitation. However, the management of this potential has not been optimal due to limited infrastructure, low capacity of fishermen's human resources (HR), and weak marketing institutions. This study aims to formulate sustainable development strategies for capture fisheries in Namrole Subdistrict and its surrounding areas. A descriptive method with a mixed qualitative and quantitative approach was applied. Primary data were collected through structured interviews with fishermen and related stakeholders, while secondary data were obtained from government institutions. Data analysis employed the IFE, EFE, and SWOT matrices to identify internal and external factors, followed by the formulation of alternative development strategies. The results indicate that capture fisheries in Namrole Subdistrict are positioned in quadrant I (aggressive strategy), meaning they possess strong internal strengths and promising external opportunities for development. The priority strategies identified include: (1) optimizing the utilization of pelagic and demersal resources to meet domestic and export market demand, (2) strengthening fishermen's human resources and institutions through training and cooperative models, (3) developing fisheries infrastructure such as ports, cold storage, and fish processing units, and (4) diversifying into aquaculture to reduce dependency on capture fisheries. In conclusion, aggressive strategies supported by government policies and private partnerships are essential to ensure productive, competitive, and sustainable capture fisheries development in Namrole Subdistrict, South Buru Regency.



Copyright©2025, Muhammad Djafar Souwakil, Ruslan H. S Tawari, Haruna, Mintje Wawo

## I. PENDAHULUAN

Kecamatan Namrole di Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, dengan keanekaragaman ikan pelagis seperti

tuna, cakalang, tongkol, layang, serta ikan demersal yang tersebar di sepanjang pesisir ((<https://burselkab.go.id/elementor-523/>). Secara ekologis, sumber daya perikanan Maluku masih



layak untuk dieksploitasi (Angkotasan et al., 2025), namun secara sosial-ekonomi belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir (Pasaribu et al., 2025). Kesenjangan antara potensi dan manfaat ini mencerminkan persoalan struktural nasional, di mana sumber daya perikanan yang melimpah di wilayah timur Indonesia belum mampu dikelola secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan, dan lemahnya kelembagaan perikanan.

Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap pembangunan ekonomi pesisir dan ketahanan pangan masih rendah (Costello & Ovando, 2019; FAO, 2022). Rendahnya produktivitas nelayan, keterbatasan sarana penunjang seperti pelabuhan, cold storage, dan pasar ikan, serta lemahnya integrasi kebijakan antar-sektor memperburuk efektivitas pengelolaan sumber daya laut (Laitupa et al., 2023; Tuhumury et al., 2021). Selain itu, praktik penangkapan ilegal (illegal fishing) dan belum terbangunnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menimbulkan tekanan pada keberlanjutan ekosistem pesisir (Radjak et al., 2021; Setiawan et al., 2023).

Tantangan Kabupaten Buru Selatan dari sisi tata kelola tidak hanya bersifat teknis tetapi juga kelembagaan. Meskipun telah ditetapkan lima Wilayah Pengembangan (WP) perikanan dalam RPJMD, termasuk WP I yang berada di Kecamatan Namrole, implementasinya belum disertai strategi pembangunan yang terarah, sistematis, dan berbasis data. Hal ini menyebabkan potensi lokal belum termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa strategi pengembangan perikanan tangkap memerlukan pendekatan terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, diversifikasi usaha, penguatan kelembagaan nelayan, serta penerapan prinsip keberlanjutan (Pancawati, 2015; Yudhistira, 2023). Secara global, perikanan tropis menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim dan *overfishing*, sehingga strategi adaptif juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan (Lam et al., 2020). Pengembangan perikanan tangkap di wilayah timur Indonesia, termasuk Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi lokal, serta melestarikan sumber daya laut. Studi

terdahulu membuktikan bahwa pengelolaan perikanan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga ekosistem tetap produktif (Gopinath & Puvanesuri, 2006; Costello & Ovando, 2019). Lebih jauh, perikanan tangkap yang dikelola secara adaptif mampu mengurangi kerentanan sosial-ekologis akibat perubahan iklim (Hafsaridewi et al., 2019) serta menjaga keberlanjutan nilai sosial budaya masyarakat pesisir (Marlianingrum et al., 2025). Strategi pengembangan perikanan tangkap yang terencana, adaptif, dan berbasis keberlanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam mendorong pembangunan pesisir yang inklusif di Kabupaten Buru Selatan, hal ini sejalan dengan amanat rencana pembangunan baik daerah, provinsi, dan nasional.

Banyak penelitian tentang strategi perikanan di Indonesia, namun kajian spesifik mengenai perikanan tangkap di daerah timur, khususnya Kecamatan Namrole masih sangat terbatas. Wilayah ini memiliki potensi besar tetapi juga rentan terhadap persoalan klasik yang terjadi seperti lemahnya infrastruktur, terbatasnya kapasitas nelayan, serta tekanan terhadap ekosistem laut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan strategi pengembangan perikanan tangkap yang kontekstual dan berkelanjutan di Kecamatan Namrole dan sekitarnya. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan akan kebijakan berbasis data dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sektor perikanan tangkap (Desmiati et al., 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan perikanan tangkap yang relevan dengan karakteristik lokal, memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buru Selatan.

Penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan perikanan yang efektif dan berkeadilan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di wilayah Maluku dan Indonesia Timur secara umum.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Namrole dan sekitarnya, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku yang merupakan salah satu wilayah pengembangan perikanan tangkap. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangannya. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, mulai bulan April sampai dengan Juli 2025 meliputi tahap persiapan, pengambilan data, pengolahan data, dan analisis data.

## 2.2. Teknik penentuan sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam aktivitas perikanan tangkap maupun pengelolaan sektor perikanan. Responden yang dipilih meliputi kelompok nelayan aktif sebanyak 30 orang terdiri dari nelayan tuna (7 orang), Koperasi nelayan (3 orang), nelayan jaring insang (5 orang), nelayan pancing ikan dasar (5 orang) serta responden pakar yang berasal dari instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perikanan (5 orang), penyuluh perikanan (3 orang), dan perwakilan akademisi (2 orang).

## 2.3. Metode Pengumpulan dan Sumber Data

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam merumuskan strategi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Buru Selatan melalui pendekatan analisis SWOT, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor ini. Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang melekat pada kondisi aktual perikanan tangkap, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang serta ancaman yang dihadapi dari lingkungan sekitar. Dengan memahami kedua faktor tersebut, dapat dirumuskan strategi yang tepat sasaran dalam mendukung pengembangan subsektor perikanan tangkap di wilayah penelitian sebagai berikut:

#### 3.1. Analisis Faktor Internal

##### 3.1.1. Kekuatan (Strength)

###### a) Potensi sumber daya ikan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang telah disiapkan, serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan, dokumen RPJMD, PRJPD Kabupaten Buru Selatan, serta literatur relevan. Validitas data diperkuat dengan metode triangulasi melalui konfirmasi lintas responden dan diskusi dengan pakar lokal.

## 2.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta matriks EFE (*External Factor Evaluation*) untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Selanjutnya, faktor-faktor strategis tersebut dirumuskan ke dalam analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menghasilkan alternatif strategi pengembangan. Penentuan prioritas strategi dilakukan dengan menempatkan skor bobot IFE dan EFE ke dalam Matriks *Grand Strategy*, sehingga diperoleh strategi pengembangan perikanan tangkap yang paling relevan dengan kondisi lokal (Rangkuti, 1999).

Perairan Kecamatan Namrole memiliki potensi perikanan tangkap yang melimpah, baik ikan pelagis besar (tuna, cakalang, tongkol), ikan pelagis kecil dan demersal dengan kondisi ekologi yang masih layak tangkap. Potensi ini dapat menjadi penggerak utama perekonomian pesisir, mulai dari penangkapan tradisional hingga usaha skala menengah-besar. Pemanfaatannya harus sejalan dengan strategi pengelolaan yang berkelanjutan agar tidak terjadi overfishing dan degradasi ekosistem. Dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas nelayan, serta penguatan infrastruktur perikanan sangat diperlukan agar potensi tersebut dapat dioptimalkan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut jangka panjang.

###### b) Daerah Potensial Fishing Ground

Kabupaten Buru Selatan memiliki keunggulan geografis karena berada di WPPNRI 714 dan 715 yang merupakan daerah penangkapan ikan potensial di Indonesia Timur. Fishing ground ini menjadi habitat penting bagi ikan pelagis besar

seperti tuna, cakalang, dan tongkol, ikan pelagis kecil dan ikan demersal bernilai ekonomi tinggi, sehingga memberi keuntungan bagi nelayan lokal dengan biaya operasional lebih efisien. Posisi strategis ini membuka peluang besar bagi pengembangan perikanan tangkap untuk konsumsi lokal maupun ekspor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini, pemanfaatannya perlu tata kelola yang bijak agar tetap berkelanjutan dan terhindar dari risiko overfishing.

#### c) Nilai Jual Komoditas Perikanan Tinggi

Komoditas unggulan seperti tuna dan cakalang banyak ditemukan di perairan Kabupaten Buru Selatan memiliki nilai jual tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Tingginya permintaan terhadap komoditas ini menjadikan sektor perikanan tangkap berpotensi besar sebagai sumber pendapatan utama bagi nelayan sekaligus kontributor penting dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Kondisi ini menempatkan Buru Selatan dalam posisi strategis untuk memasok pasar dengan produk perikanan bernilai ekonomi tinggi yang berdaya saing. Namun, potensi nilai jual yang tinggi ini hanya dapat memberikan manfaat optimal jika didukung oleh sistem pengelolaan rantai pasok yang efektif, mulai dari penangkapan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Ketersediaan infrastruktur seperti cold storage, unit pengolahan ikan, dan akses transportasi menjadi faktor penting agar kualitas hasil tangkapan tetap terjaga hingga ke konsumen akhir. Dengan demikian, nilai jual komoditas perikanan yang tinggi tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

#### d) Rumah Tangga Perikanan dan Jumlah Nelayan

Berdasarkan data BPS 2023, terdapat 2.647 rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Buru Selatan, menjadikannya sebagai subsektor dominan dibandingkan perikanan tambak (23 rumah tangga), kolam (23 rumah tangga), dan budidaya laut (19 rumah tangga). Kecamatan Kepala Madan, Fena Fafan, dan Leksula mencatat jumlah rumah tangga perikanan tangkap terbesar, sedangkan di kecamatan Namrole memiliki 391 rumah tangga perikanan tangkap yang menegaskan bahwa aktivitas ini merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Tercatat 2.724 nelayan di Kabupaten Buru Selatan, dengan dominasi besar di subsektor perikanan tangkap. Kecamatan Kepala Madan (25,70%), Fena Fafan (23,46%), dan Leksula (21,84%) menjadi daerah dengan jumlah nelayan

terbanyak, untuk di kecamatan namrole terdapat 405 nelayan (14,87%), meskipun bukan kecamatan dengan nelayan terbanyak, Namrole tetap memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor perikanan.

#### e) Adanya dukungan pemerintah

Pemerintah daerah telah memasukkan sektor perikanan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RPJPD dan RTRW Kabupaten Buru Selatan, melalui penetapan Wilayah Pengembangan (WP) perikanan. Dukungan program dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti bantuan kapal, alat tangkap, dan pelatihan, menjadi faktor penguat.

#### f) Potensi Sumber daya Manusia Tersedia

Nelayan sebagai pelaku utama, juga terdapat kelompok masyarakat pesisir dengan kapasitas untuk dikembangkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan. Sumber daya Manusia lokal yang tersedia ini merupakan potensi untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pengelolaan usaha perikanan.

#### g) Adanya Peraturan dan Perundang-undangan

Kerangka hukum dan regulasi terkait pengelolaan perikanan sudah tersedia, baik di tingkat nasional (UU Perikanan, UU Kelautan) maupun daerah. Keberadaan regulasi ini dapat menjadi dasar hukum dalam mendorong tata kelola perikanan tangkap yang lebih terarah, adil, dan berkelanjutan.

### 3.1.2. Kelemahan (Weaknesses)

#### a) Keterbatasan Infrastruktur Perikanan

Fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, unit pengolahan ikan, dan pabrik es masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hasil tangkapan karena kurangnya sarana penyimpanan dan pengolahan yang memadai.

#### b) Teknologi Penangkapan Masih Sederhana

Sebagian besar nelayan menggunakan armada kecil (<5 GT) dengan peralatan tradisional yang memiliki jangkauan terbatas. Hal ini menyebabkan produktivitas rendah dan ketergantungan tinggi pada musim penangkapan.

#### c) Akses Permodalan Terbatas

Nelayan umumnya masih mengandalkan modal pribadi atau bantuan terbatas dari pemerintah, dengan akses yang minim terhadap lembaga keuangan formal. Akibatnya, kemampuan nelayan untuk mengembangkan usaha penangkapan maupun meningkatkan teknologi masih rendah.

#### d) Kapasitas SDM Nelayan Rendah

Tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian besar nelayan masih terbatas. Minimnya pelatihan teknis maupun manajemen usaha menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing nelayan dalam menghadapi dinamika pasar.

*e) Pemasaran Belum Terintegrasi*

Jalur distribusi hasil tangkapan masih dikuasai pedagang perantara sehingga nelayan seringkali menerima harga jual rendah. Tidak adanya sistem pemasaran terpadu dan kelembagaan nelayan yang kuat membuat posisi tawar nelayan lemah.

*f) Ketergantungan Tinggi pada Perikanan Tangkap*

Diversifikasi usaha perikanan, seperti budidaya tambak, kolam, maupun perikanan laut, masih terbatas. Ketergantungan penuh pada perikanan tangkap berisiko terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, terutama jika terjadi fluktuasi hasil tangkapan.

*g) Kelembagaan Lokal Masih Lemah*

Organisasi atau kelompok nelayan yang ada belum berfungsi optimal dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Lemahnya koordinasi dengan pemerintah maupun swasta membatasi kemampuan nelayan dalam mengakses program bantuan atau peluang pasar.

### 3.2. Analisis Faktor Eksternal

#### 3.2.1. Peluang (Opportunities)

*a) Posisi Geografis Strategis*

Kabupaten Buru Selatan berada di WPPNRI 714 dan 715 yang merupakan fishing ground potensial. Hal ini memberi peluang untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap baik untuk pasar lokal maupun ekspor.

*b) Permintaan Pasar yang Tinggi*

Komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol memiliki nilai jual tinggi dengan permintaan pasar domestik dan internasional yang terus meningkat, membuka kesempatan peningkatan pendapatan nelayan.

*c) Dukungan Program Pemerintah*

Pemerintah pusat maupun daerah menetapkan sektor perikanan sebagai prioritas pembangunan melalui kebijakan, bantuan sarana prasarana, serta pelatihan nelayan, sehingga mendukung pengembangan subsektor perikanan tangkap.

*d) Peluang Diversifikasi Usaha*

Selain perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya laut, tambak, dan kolam masih terbuka untuk dikembangkan. Diversifikasi ini dapat mengurangi ketergantungan nelayan pada hasil tangkap semata.

*e) Pengembangan Infrastruktur Maritim*

Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan, dan cold storage di Buru Selatan akan sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.

*f) Keterlibatan Swasta dan Investor*

Adanya peluang kerja sama dengan pihak swasta atau investor dalam bidang pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan dapat memperkuat rantai nilai perikanan tangkap di wilayah ini.

#### 3.2.2. Ancaman (Threats)

*a) Overfishing dan Illegal Fishing*

Ancaman penangkapan ikan berlebihan dan praktik illegal fishing dapat menurunkan stok sumber daya ikan, mengganggu keberlanjutan ekosistem, dan merugikan nelayan lokal.

*b) Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem*

Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian musim penangkapan, gelombang tinggi, dan badai, yang dapat mengurangi hasil tangkapan dan meningkatkan risiko keselamatan nelayan.

*c) Fluktuasi Harga Ikan*

Ketidakstabilan harga di pasar domestik maupun internasional berdampak pada pendapatan nelayan, apalagi jika sistem rantai pasok belum terintegrasi dengan baik.

*d) Keterbatasan Infrastruktur yang Berkelanjutan*

Jika pembangunan infrastruktur perikanan tidak segera dilakukan, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi akan terus menghambat peningkatan nilai tambah hasil tangkapan.

*e) Persaingan Pasar Global*

Produk perikanan dari Buru Selatan harus bersaing dengan daerah lain maupun produk impor. Tanpa penguatan kualitas dan sertifikasi, sulit menembus pasar ekspor yang menuntut standar tinggi.

*f) Lemahnya Penegakan Hukum*

Regulasi perikanan sudah ada, namun lemahnya pengawasan di laut membuat praktik ilegal seperti penggunaan alat tangkap destruktif dan penangkapan oleh kapal asing masih berpotensi terjadi.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dirumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mempengaruhi pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Namrole dan sekitarnya, Kabupaten Buru Selatan. Analisis ini disajikan dalam bentuk

matriks SWOT untuk memberikan gambaran faktor internal dan eksternal yang lebih sistematis mengenai kondisi aktual subsektor perikanan tangkap serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangannya. Matriks SWOT tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT Perikanan Tangkap di Kecamatan Namrole

Faktor Internal/ Eksternal	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi sumber daya perikanan pelagis dan demersal masih layak tangkap.</li> <li>Posisi di WPP 714 dan 715 sebagai fishing ground potensial.</li> <li>Komoditas unggulan (tuna, cakalang) bernilai jual tinggi.</li> <li>Jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan cukup besar.</li> <li>Dukungan kebijakan pemerintah (RPJMD, bantuan sarana).</li> <li>Ketersediaan SDM nelayan yang melimpah.</li> <li>Adanya regulasi/perundangan yang mendukung pengelolaan perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur perikanan terbatas (pelabuhan, cold storage, UPI).</li> <li>Armada kecil dan teknologi penangkapan sederhana.</li> <li>Akses permodalan masih rendah.</li> <li>Kapasitas SDM terbatas, minim pelatihan teknis/manajerial.</li> <li>Sistem pemasaran belum terintegrasi, posisi tawar nelayan lemah.</li> <li>Ketergantungan tinggi pada perikanan tangkap.</li> <li>Kelembagaan nelayan masih lemah.</li> </ol>
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;">Peluang (<i>Opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fishing ground potensial di WPP 714 dan 715.</li> <li>Permintaan pasar domestik dan ekspor tinggi untuk tuna &amp; cakalang.</li> <li>Dukungan program pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>Peluang diversifikasi usaha (tambak, kolam, budidaya laut).</li> <li>Rencana pengembangan infrastruktur perikanan.</li> <li>Peluang kerja sama dengan swasta/investor.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Risiko <i>overfishing</i> dan <i>illegal fishing</i>.</li> <li>Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.</li> <li>Fluktuasi harga ikan di pasar domestik dan global.</li> <li>Infrastruktur berkelanjutan belum terwujud.</li> <li>Persaingan ketat produk perikanan global.</li> <li>Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.</li> </ol>

Sektor perikanan tangkap di Kecamatan Namrole memiliki sejumlah kekuatan penting, antara lain potensi sumber daya ikan pelagis baik kecil maupun besar dan demersal yang masih layak tangkap, posisi strategis di WPPNRI 714 dan 715, nilai jual komoditas unggulan (tuna, cakalang, tongkol) yang tinggi, serta jumlah rumah tangga perikanan dan nelayan yang relatif besar. Faktor-faktor ini menjadi modal utama dalam pengembangan perikanan tangkap berkelanjutan. Namun, terdapat pula kelemahan signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur perikanan (pelabuhan, cold storage, unit pengolahan ikan), armada dan teknologi sederhana, lemahnya kelembagaan nelayan, serta rendahnya akses permodalan.

Dari sisi eksternal, terdapat peluang besar berupa permintaan pasar domestik dan ekspor yang terus meningkat, dukungan program pemerintah pusat maupun daerah, serta potensi diversifikasi usaha melalui budidaya laut dan

tambak. Meski demikian, terdapat ancaman serius seperti risiko *overfishing* dan *illegal fishing*, dampak perubahan iklim, fluktuasi harga ikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya strategi adaptif dan berkelanjutan dalam pengembangan perikanan tangkap.

### 3.3. Perumusan Strategis Pengembangan Perikanan Tangkap

Setelah kondisi lingkungan strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) perikanan tangkap di Kecamatan Namrole pada Kabupaten Buru Selatan teridentifikasi, maka selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengembangannya dengan menggunakan matriks atau analisis SWOT (*strengths-weakness-opportunity-threats*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat mengatasi atau

meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan tangkap hasil dari matriks SWOT dapat dilihat ancaman (*threats*). Rumusan strategi yang pada Tabel 2. diperlukan untuk pengembangan perikanan

Tabel 2. Matriks Perumusan Strategi SWOT Perikanan Tangkap di Kecamatan Namrole

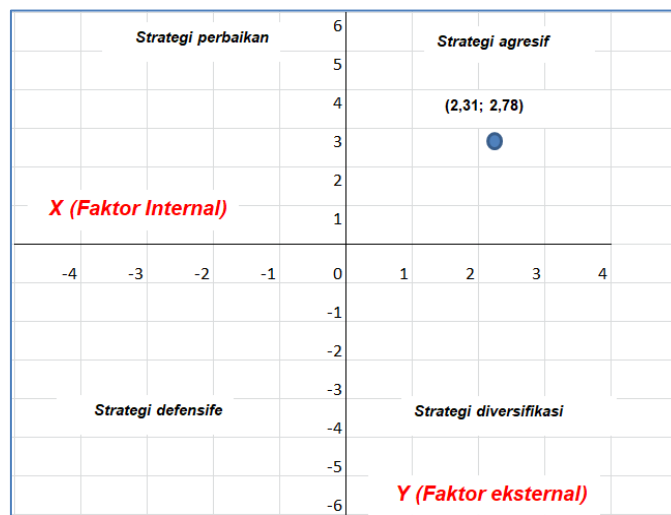
Faktor Internal / Eksternal	Peluang (O)	Ancaman (T)	
Kekuatan (S)	<p>Strategi SO (<i>Strength-Opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan potensi perikanan pelagis dan demersal (S1) untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor yang tinggi (O2).</li> <li>2. Memanfaatkan posisi strategis di WPP 714 dan 715 (S2) dengan dukungan program pemerintah (O3) untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.</li> <li>3. Mengembangkan produk unggulan seperti tuna, cakalang, layang (S3) dengan melibatkan kerjasama swasta dan investor (O6) guna memperluas pasar.</li> <li>4. Memanfaatkan jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan yang besar (S4) untuk diversifikasi usaha ke sektor tambak, kolam, dan budidaya laut (O4).</li> </ol>	<p>Strategi ST (<i>Strength-Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan dukungan regulasi dan perundangan (S7) untuk memperkuat pengawasan terhadap illegal fishing (T1) dan menjaga keberlanjutan stok ikan.</li> <li>2. Menggunakan dukungan pemerintah (S5) untuk membangun infrastruktur adaptif menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem (T2).</li> <li>3. Menguatkan kapasitas SDM nelayan (S6) agar mampu bersaing dengan pasar global (T5) melalui peningkatan kualitas produk dan sertifikasi.</li> <li>4. Memaksimalkan fishing ground potensial (S2) dengan sistem penangkapan ramah lingkungan untuk menghindari overfishing (T1).</li> </ol>	
	Kelemahan (W)	<p>Strategi WO (<i>Weakness-Opportunities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur perikanan (W1) melalui program pembangunan pelabuhan, cold storage, dan UPI (O5).</li> <li>2. Mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap (W6) dengan memanfaatkan peluang diversifikasi usaha (O4).</li> <li>3. Mengakses bantuan permodalan dan kemitraan dengan investor (O6) untuk mengatasi keterbatasan modal nelayan (W3).</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan (W7) melalui dukungan pemerintah (O3) agar pemasaran lebih terintegrasi.</li> </ol>	<p>Strategi WT (<i>Weakness-Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas nelayan (W4) melalui pelatihan adaptasi cuaca ekstrem dan perubahan iklim (T2).</li> <li>2. Mengurangi kelemahan armada kecil dan teknologi sederhana (W2) dengan memperkuat regulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan (T1, T6).</li> <li>3. Mengurangi ketergantungan pada tengkulak (W5) dengan memperkuat kelembagaan pemasaran agar lebih tahan terhadap fluktuasi harga (T3).</li> <li>4. Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan (W1) untuk menghadapi ancaman lemahnya rantai pasok global (T4, T5).</li> </ol>

Hasil pembobotan dan skoring faktor internal (kekuatan-kelemahan) serta faktor eksternal (peluang-ancaman) diperoleh nilai X = 2,31 dan Y = 2,78. Titik koordinat tersebut berada pada kuadran I (Strategi Agresif) dalam Matriks Grand Strategy (Gambar 1). Analisis SWOT menunjukkan bahwa pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Namrole berada pada kuadran I (strategi agresif), yang berarti bahwa strategi pengembangan harus diarahkan pada

pemanfaatan optimal kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal, sambil tetap mengantisipasi kelemahan dan ancaman.

Strategi pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Namrole perlu menitikberatkan pada optimalisasi potensi sumber daya perikanan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur adaptif, serta diversifikasi usaha perikanan. Kombinasi strategi SO, ST, WO, dan WT saling melengkapi sehingga

dapat mendukung keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Gambar 1. Diagram Hasil Analisis SWOT

Penjelasan lebih rinci strategi prioritas pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Namrole yang dihasilkan meliputi:

1. *Optimalisasi Potensi Perikanan (Strategi SO-Strength–Opportunities)*

Strategi ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal yang tersedia. Kecamatan Namrole dan sekitarnya memiliki potensi perikanan pelagis (tuna, cakalang, tongkol, layang) maupun demersal yang masih berada dalam kondisi layak tangkap. Potensi ini semakin bernilai karena didukung oleh tingginya permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor, yang dapat mendorong peningkatan pendapatan nelayan. Posisi Kabupaten Buru Selatan yang strategis di dalam WPPNRI 714 dan 715 memberi keuntungan kompetitif bagi pengembangan perikanan tangkap, karena kawasan ini dikenal sebagai salah satu fishing ground utama di Indonesia Timur. Produk unggulan seperti tuna dan cakalang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta maupun investor, sehingga akses pasar dapat diperluas dan nilai jual produk meningkat.

Jumlah rumah tangga perikanan yang besar dapat menjadi modal penting dalam mendukung diversifikasi usaha. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga mencakup pengembangan sektor tambak, kolam, dan budidaya laut. Diversifikasi tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada hasil tangkapan semata, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Pemanfaatan potensi ikan pelagis besar di WPP 714 dan 715 juga sejalan dengan penelitian Medea et al, (2025) yang menekankan pentingnya pemetaan stok ikan berbasis ekosistem untuk mendukung keberlanjutan perikanan tangkap. Namun, agar potensi ini benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi, perlu adanya integrasi rantai pasok yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur pasca-tangkap modern, seperti cold storage dan unit pengolahan ikan (Fan et al., 2022).

2. *Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan (Strategi ST-Strength–Threats)*

Strategi ini difokuskan pada pemanfaatan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal yang berpotensi menghambat pengembangan perikanan tangkap. Adanya dukungan regulasi dan perundangan menjadi instrumen penting dalam memperketat pengawasan praktik illegal fishing, sehingga keberlanjutan stok ikan tetap terjaga. Selain itu, dukungan pemerintah dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang adaptif untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

Kapasitas sumber daya manusia nelayan juga perlu diperkuat agar mereka mampu bersaing di pasar global. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis, manajerial, dan sertifikasi mutu produk, sehingga kualitas hasil tangkapan dapat memenuhi standar internasional. Pemanfaatan *fishing ground* potensial harus dibarengi dengan penerapan teknologi penangkapan ramah lingkungan, guna mencegah risiko overfishing sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Keterlibatan aktif nelayan lokal dalam pengelolaan perikanan menjadi faktor kunci, meskipun hingga kini keterampilan teknis dan manajerial mereka masih terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadi et al. (2025) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis co-management mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat daya saing global. Kelembagaan nelayan perlu diarahkan pada model koperasi atau kelompok usaha bersama yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar (Azmi et al., 2024).

### 3. Diversifikasi Usaha Perikanan (Strategi WO-Weakness-Opportunities)

Strategi ini diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Keterbatasan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, cold storage, dan Unit Pengolahan Ikan (UPI), dapat diatasi melalui program pembangunan yang terintegrasi dengan dukungan pemerintah maupun kerja sama dengan investor. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperlancar rantai pasok dan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun ekspor.

Diversifikasi usaha juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap perikanan tangkap. Pengembangan tambak, kolam, dan budidaya laut memberikan alternatif sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan studi Sangadji et al. (2025) yang menunjukkan bahwa diversifikasi usaha pesisir mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan. Dengan adanya diversifikasi, risiko yang ditimbulkan dari fluktuasi stok dan harga ikan dapat diminimalkan. Masalah keterbatasan modal nelayan dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang kemitraan bersama swasta atau investor, sehingga akses permodalan menjadi lebih luas. Kelembagaan nelayan juga perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan pemerintah agar pemasaran hasil tangkapan lebih terintegrasi dan posisi tawar nelayan meningkat. Implementasi program pemerintah daerah yang berorientasi pada *blue economy* akan semakin memperkuat resiliensi sosial-ekonomi masyarakat Namrole, sekaligus mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

### 4. Adaptasi terhadap Ancaman Eksternal (Strategi WT-Weakness-Threats)

Strategi ini berfokus pada upaya meminimalkan kelemahan internal sekaligus mengurangi dampak ancaman eksternal. Kapasitas nelayan perlu ditingkatkan melalui pelatihan

adaptasi terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika lingkungan laut yang semakin sulit diprediksi. Kelemahan pada armada kecil dan teknologi penangkapan sederhana juga harus diatasi dengan penerapan regulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang dapat menjaga kelestarian ekosistem perairan. Ketergantungan nelayan pada tengkulak dalam pemasaran hasil tangkapan merupakan kelemahan lain yang harus diperbaiki. Hal ini dapat diatasi dengan memperkuat kelembagaan pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan lebih tahan terhadap fluktuasi harga pasar. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur perikanan yang berkelanjutan, seperti rantai pasok modern dan sarana penyimpanan hasil tangkapan, menjadi penting untuk mengantisipasi lemahnya rantai distribusi global sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.

Tantangan perubahan iklim dan praktik *illegal fishing* semakin menuntut adanya strategi adaptif. Lam et al., (2020) menegaskan bahwa sektor perikanan tropis menghadapi risiko tinggi akibat kenaikan suhu laut dan intensitas cuaca ekstrem. Oleh karena itu, penerapan teknologi ramah lingkungan serta penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat (*community-based monitoring*) sebagaimana diterapkan di beberapa wilayah Maluku (Wahyuni et al., 2025) dapat menjadi solusi dalam menjaga keberlanjutan stok ikan. Dengan demikian, strategi WT menegaskan pentingnya penguatan kapasitas nelayan, perbaikan sistem pemasaran, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penerapan tata kelola adaptif untuk mengurangi risiko eksternal. Strategi ini melengkapi arah pengembangan perikanan tangkap di Kecamatan Namrole, yang secara keseluruhan berfokus pada optimalisasi potensi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Buru Selatan.

Di beberapa hasil penelitian di berbagai wilayah Indonesia juga menekankan pentingnya strategi terintegrasi dalam pengembangan perikanan. Studi Pancawati (2015) dan Sangadji et al., (2025) menunjukkan bahwa diversifikasi usaha perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengurangi kerentanan ekonomi. Sementara itu, penelitian Yudhistira (2023) menegaskan adanya ancaman overfishing pada ikan pelagis kecil dan demersal akibat lemahnya pengawasan, serupa dengan risiko yang juga akan dihadapi di kecamatan Namrole jika tidak dikelola

secara baik. Secara global, FAO (2022) dan Cochrane & Garcia (2023) menekankan penerapan *ecosystem approach to fisheries management* sebagai pendekatan utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Perikanan tropis sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga strategi adaptif melalui teknologi ramah lingkungan dan pengawasan berbasis masyarakat menjadi sangat relevan diterapkan di wilayah Namrole.

Implikasi penelitian ini penting diterapkan bagi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Buru Selatan. Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan dan memperkuat dukungan kelembagaan nelayan secara terencana dan berkesinambungan. Nelayan perlu meningkatkan kapasitas adaptasi dan diversifikasi usaha untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi stok dan harga ikan. Sementara itu, keterlibatan swasta melalui investasi rantai pasok perikanan akan

sangat mendukung peningkatan daya saing produk unggulan Namrole di pasar domestik maupun global.

#### IV. PENUTUP

Perikanan tangkap di Kecamatan Namrole dan sekitarnya memiliki potensi besar melalui ketersediaan sumber daya ikan pelagis dan demersal, serta posisi strategis di WPPNRI 714 dan 715. Hasil analisis SWOT menempatkan sektor ini pada kuadran I (strategi agresif) artinya memiliki kekuatan dan peluang besar untuk dikembangkan. Rumusan rencana strategi prioritas yang dapat diimplementasikan meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor, (2) penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan, (3) pembangunan infrastruktur perikanan modern, serta (4) diversifikasi usaha ke sektor budidaya laut guna mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap.

#### REFERENSI

- Angkotasan, A. M., Tawari, R. H. S., Daud, A. H., Norau, S., Sangadji, M. S., Sangadji, S., & Suhaemi, S. (2025). Keberlanjutan Ekologi dan Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan: Mewujudkan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 9(3), 196-209.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1).
- Azmi, U., Daroini, A., & Saputra, B. M. (2024). Manajemen Usaha Perikanan Laut Berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Tangkap Kelas Kub Mina Klatak Di Desa Keboireng Di Kabupaten Tulungagung. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(2), 374-384.
- Costello, C., & Ovando, D. (2019). Status, institutions, and prospects for global capture fisheries. *Annual Review of Environment and Resources*, 44(1), 177-200.
- Desmiati, I., Uthary, L., Aryzegovina, R., & Putra, D. E. (2022). Analisis Pemasaran Ikan Segar Laut Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Dengan Pendekatan SWOT. *Jurnal Pundi*, 6(1).
- Desmiati, I., Uthary, L., Aryzegovina, R., & Putra, D. E. (2022). Analisis Pemasaran Ikan Segar Laut Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Dengan Pendekatan SWOT. *Jurnal Pundi*, 6(1).
- Fan, G., Xie, X., Chen, J., Wan, Z., Yu, M., & Shi, J. (2022). Has China's Free Trade Zone policy expedited port production and development?. *Marine Policy*, 137, 104951.
- FAO (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation*. FAO: Rome, Italy. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Gopinath, N., & Puvanesuri, S. S. (2006). Marine capture fisheries. *Aquatic Ecosystem Health & Management*, 9(2), 215-226.
- Hadi, S., Soetiono, S., Subekti, S., & Aji, J. M. M. (2025). Pendekatan Kolaborasi Model Hexahelix Dalam Optimalisasi Peran BUMDes Pada Pengembangan Kawasan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir. *Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia*.
- Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., & Adimu, H. E. (2019). Pendekatan sistem sosial-ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(2), 61-74.
- Laitupa, J. P., Baskoro, M. S., Wiryawan, B., & Mustaruddin, M. (2023). Livelihoods Sustainability of Tuna Handline Fishery in Buru Island. *Agrikan Jurnal Agribisnis Perikanan*, 16(1), 1-13.

- Lam, V. W., Allison, E. H., Bell, J. D., Blythe, J., Cheung, W. W., Frölicher, T. L., ... & Sumaila, U. R. (2020). Climate change, tropical fisheries and prospects for sustainable development. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(9), 440-454.
- Marlianingrum, P. R., Noferiyansyah, S., Bello, F., Sabina, A. A., & Santoso, G. (2025). Peran, Organisasi, dan Kekayaan Kearifan Lokal dalam Keberlanjutan Sosial Ekonomi Perikanan Tradisional. *JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut dan Air Tawar*, 1(1), 43-52.
- Medea, J. J., Yuliana, E., & Anwar, K. (2025). Status Pengelolaan Perikanan Tuna (*Thunnus Sp.*) Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Dengan Ecosystem Approach To Fisheries Management (EAFM). *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 9(2), 197-206.
- Pancawati, Y. D. (2015). Pengembangan kawasan minapolitan (studi kasus: pelabuhan perikanan Samudera Cilacap). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11(3), 365-376.
- Pasaribu, N., Purba, B., Ujung, S., Sembiring, G. B., & Sitorus, M. (2025). Kebijakan Ekonomi Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3895-3910.
- Radjak, S. A., Tupamahu, A., Tuapetel, F., Haruna, H., & Tawari, R. H.S. (2021). Utilization and surveillance of Fisheries Tuna Resources as a Basis for Prevention of IUU Fishing in Seram Sea. *Agribisnis: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(1), 135-140.
- Rangkuti, F. (1999). Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Sangadji, M., Pattimahu, T. V., Haruna & Tawari, R.H.S. (2025). Household Income Diversification Strategy for Tuna Fishermen in Tehoru District, Central Maluku Regency, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries*. Vol. 29(2): 2931 – 2944 (2025).
- Setiawan, D. B., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Collaborative Government Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(7), 817-823.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tuhumury, S. F., Abrahamsz, J., Sahetapy, D., Tetelepta, J. M., & Haulussy, J. (2021). Respons Pengelolaan Kolaboratif Terumbu Karang di Desa Biloro Kabupaten Buru Selatan. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 17(1), 1-9.
- Wahyuni, S., Mursawal, A., & Kurniawan, R. (2025). Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Laut dan Pulau-Pulau Kecil: Tinjauan terhadap Pendekatan Ekologis, Sosial, dan Kebijakan. *Kepedulian Manajemen Asia Tenggara*, 2 (2), 71-78.
- Yudhistira, E. (2023). Model Ekonomi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Teluk Ciletuh Kabupaten Sukabumi (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).